

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekspansi kelapa sawit baru-baru ini merupakan isu temporer dari beberapa perspektif. Dari sudut pandang ekonomi, kelapa sawit dipandang sebagai factor yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Namun, jika diperhatikan secara politis, ekspansi sawit tentu akan melihat bagaimana perimbangan kekuasaan berjalan dalam Dominasi dan ketundukan,serta juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan pada kesempatan itu. Berbicara tentang politik itu sendiri tidak lepas dari relasi kekuasaan apa yang terjadi di dalamnya. Relasi kuasa ini terdiri dari relasi-relasi yang bersifat superioritas dan subordinasi. Politik itu sendiri berkaitan dengan politik Pemerintahan dan posisi pejabat pemerintah (Rauf 2001). Berbeda dengan ekologi politik yang memiliki hubungan dengan lingkungan dan sosial dipolitisasi.

Mengacu pada tulisannya Bryant (1997) tentang ekologi politik sendiri tidak lepas dari masalah dan krisis lingkungan dan sosial. Dan ekologi politik juga akan muncul perubahan karena distribusi yang tidak merata, terutama perubahan lingkungan (ekologi) dan sosial. Konsekuensinya menyangkut marginalisasi kaum subordinat (kelas bawah).

Melalui pendekatan ekologi politik Tata kelola Lingkungan diharapkan mampu membedah problematika di lapangan untuk dapat mengetahui bagaimana konflik yang terjadi di dalamnya, siapa saja yang berkonflik (aktor), apa ideologi dari masing-masing pihak (gerakan aktor), Bagaimana pertanggung jawaban Korporasi terhadap masyarakat dan pemerintah, pada arena apa konflik itu terjadi, serta apa akibat yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan berimplikasi langsung dengan system kelembagaan sosial sehingga memaksakan kelembagaan lokal melakukan penyesuaian dan menggenalisir beberapa aturan lokal, penghancuran struktur lokal ini tidak hanya

akibat kebijakan Pemerintahan daerah yang sentralistik namun sentralistik kebijakan dan demokrasi otonomi di dalam bidang perkebunan pun tidak membawa perkembangan yang berarti dari aspek kelembagaan, sosial dan ekonomi masyarakat komunitas kaum yang bersinggungan langsung dengan sumber-sumber daya alam yang dikelola oleh pemilik modal (perusahaan) yang eksploitatif. Makna nya adalah kebijakan pemerintah pusat, Pemda/otonomi daerah, kelurahan/desa, belum selaras dalam kebijakan lingkungan yang berimplikasi pada penggunaan lahan, sederhananya HGU memiliki dampak yang harus selalu dimonitoring terutama dalam kasus ini oleh PT. Agromuko.

Persoalan ini dapat dilihat dari system perkebunan yang masih diliputi oleh dualisme ekonomi, yaitu antara perkebunan besar yang menggunakan modal (kapitalis) dan teknologi secara intensif dan menggunakan lahan secara ekstensif serta manajemen eksploitatif terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan perkebunan rakyat yang subsisten (tradisional) serta luas lahan terbatas. Kedua sistem ini menguasai bagian tertentu dari masyarakat dan keduanya hidup berdampingan, perbedaan keduanya tidak jarang menimbulkan konflik budaya akibat dinamika politik dibalik ekspansi PT. Agromuko yang berkembang menjadi kutukan sumber daya alam bagi wilayah ini.

Salah satu contoh konflik budaya yang terjadi antara masyarakat di Sungai Ipuh di Desa Lubuk Saung terasterjam dengan PT. Agro Muko merupakan dampak perbedaan system antar keduanya yang merupakan power over atas hegemoni dari negara untuk tanah usaha dan kebijakan itu kemudian menjadi Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan yang dinikmati oleh korporasi dengan leluasa tanpa adanya keadilan lingkungan seperti ketidakpastian hak masyarakat yang hidup secara turun temurun di wilayah tersebut (masyarakat adat dengan tenurial geneologisnya) tidak pernah ditanggapi ataupun diselesaikan dengan baik, namun malah dilakukan pemaksaan nilai-nilai kepentingan dan intimidasi dalam prosesnya.

Masuknya pemodal dalam sector perkebunan ini PT. Agromuko dianggap tidak memberikan kontribusi sepenuhnya pada tingkat kesejahteraan masyarakat setempat, dapat diketahui bahwa hampir sebagian masyarakatnya disekitar PT. Agromuko adalah bekerja sebagai buruh harian di PT. Agro Muko yang tentunya dengan upah di bawah

standar minimum. Sehingga juga terjadi ketimpangan sosial akibat marjinalisasi dibawah tangan kapitalis.

Hingga saat ini pun juga masih belum maksimalnya distribusi aset dan manfaat dari hasil usaha perkebunan PT. Agromuko yang terbilang minim diterima oleh desa-desa disekitar PT. Agromuko apalagi belum adanya Kebun Masyarakat Desa (KMD) teruntuk desa yang baru mengalami "*pemekaran*". jika adapun hanya untuk kepentingan sosial seperti bantuan akses jalan umum yang menjadi akses keluar masuk transportasi PT, Agromuko dan bantuan akan infrastruktur masyarakat setempat seperti tempat ibadah (sumbangan masjid) harus melalui mekanisme yang rumit yang berasal dari dana **CSR** yang saat ini mempunyai persyaratan alur proses yang panjang.

Berbicara tentang dana CSR tentu ini merupakan suatu isu sentimental di kabupaten Mukomuko karena sering terdapat prespektif negatif tentang penyaluran penyaluran dana ini. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitarnya dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan (tujuan tertentu).

Namun hal ini tidak lepas dari yang namanya kontroversi, kesalah pahaman di lingkup sosial seperti adanya tudingan dana CRS hanya dialirkan kebeberapa hanya masuk di yayasan milik pejabat daerah sehingga dikhawatirkan ada 'permainan' antara pemerintah dan PT. Agro Muko dan isu suap menyuap untuk menutupi kasus pelanggaran HGU, kasus alif fungsi lahan, terutama kebungkaman Pemerintah daerah terkait Limbah pabrik mukomuko yang masih di buang ke sungai umum (*ai selagan*) walaupun sudah mengalami proses system serob dan anaerob di kolam tempat penyimpanan sementara (TPS), tetap saja akan menimbulkan dampak pencemaran air sungai selagan jika ini berlangsung berkepanjangan tanpa kita sadari.

Dan dibalik itu juga terdapat konflik sosial budaya berupa sengketa ataupun eksploitasi lahan oleh PT. Agromuko yang tidak mengindahkan norma adat yang berlaku di wilayah local ini yang masih mempercayai sistem "*hukum adat*" melalui sumber data dari berita media massa atau surat kabar elektronik (*akar Foundationn*) memberitakan

tentang masyarakat Sungai Ipuh, desa Teras terunjam-Lubuk Saung masih meyakini adanya kekuatan gaib diluar kemampuan manusia sehingga dalam membuka hutan dilakukan ritual atau doa untuk meminta izin kepada “tetua adat atau kelapo kaum” untuk pembukaan lahan disekitar desa, terutama untuk mendapatkan keselamatan dalam mengelola lahan dalam bahasa lokal aktivitas yang dilakukan ini disebut “*doa buka rimbo*”. Sehingga ketika sistem ini tidak dilaksanakan akan adanya bala diwilayah tersebut yang harus diselesaikan dengan cara hukum adat berupa sanksi adat biasanya berupa kesepakatan antara masyarakat sendiri yang tertulis dalam aturan bersama, seperti punjung putih dan punjung kuning (hukum adat) merupakan bentuk mediasi dengan lingkungan dan musyawarah anatar pihak dalam penggunaan wilayah, walaupun perusahaan sudah mempunyai HGU dari pemerintah daerah, namun hal ini sangat sering dipelekan dan senonoh akan aturan adat yang berlaku di seluruh wilayah mukomuko sebagai “kampung sati ratau batuah”.Serta kondisi sosial masyarakat yang kecewa akan respon pemerintah yang dianggap tidak efektif dalam menanggapi permasalahan konflik lahan antara lahan masyarakat dan PT. Agromuko yang selalu berseteru. Sehingga gencar kritikan, demonstrasi dikantor bupati mukomuko.

Bahkan terdapat gerakan sosial wilayah di Air dikit yang bagian dari kecamatan kabupaten Mukomuko pernah melayang surat ke presiden Jokowi sebagai pesan untuk menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Perseroan Terbatas Agromuko. Dalam surat tersebut, sedikitnya ada 8 pokok persoalan yang mendasari masyarakat menolak keberadaan PT. Agromuko. Diantaranya adalah perusahaan dianggap tidak mengindahkan peraturan serta kaedah-kaedah dalam usaha perkebunan.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Mukomuko, yang menyatakan Kecamatan Air Dikit masuk ke dalam wilayah ibu kota dan tidak diperuntukkan untuk areal usaha perkebunan/perusahaan namun masih berlangsung hingga saat ini tanpa adanya alih fungsi lahan dan pengembalian lahan ke masyarakat.

Selanjutnya, proses ganti rugi tanaman tumbuh terhadap masyarakat pemilik lahan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.Surat tersebut juga menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. Agromuko, misalnya pencemaran lingkungan, penanaman tanaman di sempadan sungai

dan danau, galian C, hingga penyerobotan lahan masyarakat yang menandakan kondisi sosial yang rumit dan kompleks akibat Ekspansi PT. Agromuko

Dampak terdasyat yaitu kerusakan lingkungan sebagaimana laporan dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko memiliki skala kerja dalam wilayah hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 78 ribu hektar di kabupaten Mukomuko mendapati beberapa kasus .

Tabel 1.1. Kasus Lingkungan Kab. Mukomuko

No	Kasus Pelanggaran Lingkungan	Aktor Lingkungan	Waktu	Informan
1	Sekitar 1.511 hektar ekspansi perkebunan sawit PT. Agromuko berada dalam kawasan hutan yang diluar HGU PT. Agromuko	Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kab.Mukomuko	Sabtu, 3 September Tahun 2022 23:38 WIB	Aprin Sihaloho (Kepala KPH)
2	Kurang lebih 700 hektar ekspansi PT. Agromuko merambah diluar HGU yang sebenarnya hanya 2.500 untuk HGU PT.Agromuko	Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Sadar Hukum kab. Mukomuko (LSM Grashi)	Senin, 19 Juli Tahun 2010 06:00 WIB	Arifin (Ketum LSM Garashi)

Sumber Data : Media Elektronik Mukomuko

Pertaman, bahwa dari isi table diatas maka kita dapat beberapa penjelasan mengenai kasus pelanggaran HGU sebelumnya terjadi pada tahun 2010 Kurang lebih 700 hektar ekspansi PT. Agromuko merambah diluar HGU yang sebenarnya hanya 2.500 untuk HGU PT.Agromuko . Mengapa hal ini terjadi dan tentu sangat berpengaruh terhadap sosial dan ekologi di Kabupaten Mukomuko dengan keberadaan perusahaan PT. Agromuko ini secara signifikan. Kedua, mengenai 1.511 hektar ekspansi perkebunan sawit PT.

Agromuko berada dalam kawasan hutan yang diluar HGU PT. Agromuko, kemudia harus ditindak lanjuti unutk mengurus pelanggaran izin pelepasan atau pakai pinjam lahan yang berada di zona larangan pembukaan lahan (zona hijau), karena menurut hasil pemantauan KPH Mukomuko yang sebelumnya memiliki wilayah kerja dalam kawasan hutan produksi (HP,HPT) meningkat dari 74-78 hektar yang harus dipertanggung jawabkan oleh PT. Agromuko. Dampak yang sangat urgensi mengenai ekologi yaitu pencemaran lingkungan (deforestasi dan degradasi hutan,penyemaran sungai,udara) muncul akibat Ekspansi TBS kelapa sawit PT. Agromuko yang berada di berbagai wilayah kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, karena persebaranya sangat besar, dimana titik wilayah sebaran sawit sekitar 22,928 hektar dan dilengkapi dengan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton TBS/jam terutama di bangun di Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Tanah Rekah Estate, Air dikit, Sari Bulan diKabupaten Mukomuko. Berikut adalah Ekspansi PT. Agromuko di Kabupaten Mukomuko:

Table 1.2. wilayah perkebunan PT.Agromuko di Mukomuko

No	Nama	Tanaman Produksi	Tanaman Non-Produksi	Total lahan produksi dan non-Produksi
1	Mukomuko Estate	2.109,01 (ha)	1.577,27 (ha)	4.101,2 (ha)
2	Tanah Rekah Estate	2.985,98 (ha)	74,37 (ha)	3.849 (ha)
3	Talang petai Estate	2.103,00 (ha)	12 (ha)	2.270 (ha)
4	Sungai betung Estate	478.24 (ha)	2.507,25 (ha)	14.001,35 (ha)
Jumlah Total Lahan Produksi		767.623 (ha)		
Jumlah Total Lahan non-Produksi		213.000 (ha)		
Total Lahan lahan HGU PT.Agromuko		980.623 (ha)		

Sumber data :(ISPO, 2015)

Tentu dengan skala sebaran wilayah yang luas menurut data diatas, ekspansi TBS kelapas sawit ini menjadi factor utama degradasi hutan yang semakin parah akibat yang juga dampak dari kebijakan pembangunan berkelanjutan yang hanya fokus pada tujuan ekonomi, tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam.

Karena dampak sosial dan ekologi yang terpilin dengan keberadaan PT. Agromuko ,maka penelitian ini sangat menarik dikaji dan dianalisa dengan mendalam karena memiliki dampak negatif yang cukup berpengaruh mengenai sosial dan ekologis di kabupaten Mukomuko. Berbagai masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam selama ini diperlakukan sebagai masalah teknis, dan tata kelola lingkungan yang buruk (dispolitisasi politik ekologi) dan juga tidak terlepas dari kutukan sumber daya alam yang menjadi bahan acuan penelitian.

Dari deskripsi di atas menunjukkan bahwa masalah sumber daya alam memang bukan hanya masalah teknis, tetapi juga bisa menjadi masalah struktural, bahkan politik, karena berkaitan dengan penggunaan atau pengelolaan sumber daya alam masif. Oleh karena itu, karena pentingnya membahas masalah sumber daya alam dan sosial-politik, maka penulis akan membahas penelitian ini lebih detail melalui pendekatan “*Politik ekologi*”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Dampak Sosial dan Ekologi ekspansi PT. Agromuko di Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu sosial dan lingkungannya ?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak negatif sosial dan ekologis yang muncul di masyarakat, lingkungan disekitar terkait kasus Ekspansi PT. Agromuko di Kabupaten Mukomuko.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi akademis ataupun non-akademis khususnya untuk penelitian selanjutnya tentang dampak Ekologi-Sosial dari Ekspansi PT. Agromuko di Kabupaten Mukomuko

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai dampak Ekspansi PT. Agromuko bagi pihak Pemerintah, korporasi, masyarakat dan lingkungan hidup.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca dalam memahami dampak ekspansi PT. Agromuko pada sosial dan ekologis bagi masyarakat, lingkungan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang sejenis selanjutnya.

E. Literatur Review

No	Peneliti	Jenis	Hasil
1	Rizka Amalia, Arya Hadi Dharmawan, Lilik B. Prasetyo, Pablo Pacheco (Amalia et al., 2019)	Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi	Dampak ekonomi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit yaitu terjadinya transformasi mata pencaharian Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak pada tingginya frekuensi konflik sosial khususnya konflik antar petani dan petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Maraknya ekspansi kelapa sawit juga berdampak pada ekologi khususnya pada perubahan tutupan lahan pencemara lingkungan.
2	Muhammad Risal (Risal, 2015)	Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi.	Kehadiran MNC ini tidak hanya memiliki dampak secara ekonomi saja, namun juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan aspek sosial budaya dimana dampak yang dihasilkan merupakan dampak yang memiliki konsekuensi terhadap

		Muhammad	<p>kerusakan lingkungan, bencana alam, ketimpangan pendapatan akibat upah buruh yang murah, serta hilangnya norma-norma kearifan budaya lokal masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sawit. Hal ini tentu saja harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah jika tidak ingin menuai masalah yang lebih besar di kemudian hari, khususnya untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur.</p>
3	Katriani Puspita Ayu (Ayu, 2021)	Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah: Mekanisme Politik Di Balik Kerusakan Ekologi	<p>Semua akibat ekologi tersebut terjadi di latarbelakangi oleh mekanisme “Dagang konsesi” di setiap level otoritas yang memberi ijin tanpa memperhatikan prosedur dan regulasi yang</p>

			berlaku.
4	Indria Retna Mutiar (Fabiana Meijon Fadul, 2019a)	Kapitalisme Dan Marjinalisasi Masyarakat Lokal Dalam Arena Kuasa Dan Pengetahuan	¹ Masyarat dan keberlangsungan sumber daya alam , ² Ekpsansi Kelapa sawit : Power dan Marjinalisasi maskuarakat Lokal , ³ Aktor ruang,kuasa, pengetahuan.
5	Nursantri Hidayah, Arya Hadi Dharmawan, dan Baba Barus (Hidayah et al., 2016)	Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perubahan Sosial Ekologi Pedesaan	¹ Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan perubahan lanskap ekologi TNTN dimana hutan menjadi terdegrasi secara masif, ditunjang dengan tingginya ekspansi kepala sawit kedalam kawasan maka ancaman terhadap keberlangsungan kawasan sebagai kawasan konservasi semakin tinggi. ² Perubahan lanskap ekologi juga telah menyebabkan perubahan sistem penghidupan masyarakat sekitar

			taman nasional.
6	<p>Eddy OS Hiarije, Fitriadi Muslim, Very antony, , Paku Utama, Abetnego Tarigan, Rivani Noor, Reda Matrovani, Yustinus Prastowo , Mouna Wasef Pramudya, Yustinus Prastowo Mouna Wasef Pramudya Azhar Oktavinanda, (Clark et al., 2003)</p>	<p>Pertanggung jawaban Korporasi Di Sektor Lingkungan</p>	<p>Meminta pertanggungjawaban korporasi, terkait dugaan yang tindak pidana yang dilakukan korporasi merupakan perkara rumit.</p>
7	<p>Fabiana Meijon (Fabiana Meijon Fadul, 2019b)</p>	<p>Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang</p>	<p>Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam kerangka regulasi. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJPD</p>

			<p>Kabupaten Mukomuko bukan hanya penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapat legitimasi Peraturan Daerah yang menjadi instrument penting untuk mengarahkan, evaluasi dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Kabupaten.</p>
8	<p>Maisar Aprianto (Studi et al., 2021)</p>	<p>Impresi Investasi Pt. Agromuko Di Sektor Perkebunan Sawit terhadap Kerusakan Lingkungan</p>	<p>kejahatan lingkungan akibat operasional PT. Agromuko dalam pemanfaatan sumber daya alam di Bengkulu. Bahwa forst crimen (kejahatan hutan) oleh PT. Agromuko di kawasan hutan wilayah Bengkulu dibawah</p>

			<p>naungan pemerintah, serta adanya tindakan penyelewangan data teradap dokumne RSPO, terkait izin HGU PT. Agromuko. Namun dalam penelitian ini tidak mengakaji masalah dampak ekonomi yang diteliti sebelumnya. Kerusakan lingkungan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat seperti berkurangnya lahan hutan, pencemaran sungai, rusaknya habitan flora dan fauna akibat keditidakseimbangan ekosistem hutan yang sudah menjada area perkebunan kelapa sawit yang bersangkutan dengan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Provinsi Bengkulu</p>
9	Wiko Saputra , Sadam Afiam ,	Kerentanan Sistem Perizinan	Persoalan tata kelola perizinan masih rawan dengan praktik korupsi.

	Ricwanudin Christiw Afriani (Barat & Penulis, n.d.)	Perkebunan Sawit Studi Kasus di Provinsi Papua Barat	Izin-izin yang sudah diterbitkan belum dilakukan pengawasan yang baik dan masih tinggi risiko kerugian keuangan negara dalam tata kelola perkebunan sawit dan pelanggaran hukum lingkungan yang tak terbendung.
10	Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, dan Baba Barus (Suryadi et al., 2020)	Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Hidup Studi Kasus kab. Pelalawa, Riau	Dampak sosial akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan terjadi konflik dan pergeseran norma adat, nilai kehidupan dan norma dalam penyelesaian konflik.

Pertama, penelitian acaun penelitan “Perubahan Tutupan Lahan AkibatEkspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi ” yang memiliki kesamaan tentang populasi sampling (kasus) Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini lebih

memandang pada pendekatan atau melalui sudut pandang Ekologi politik mengenai sosial dan ekologinya.

Kedua, persamaan jenis penelitian “Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi ini berkaitan dengan sosial budaya dan sedangkan dalam penelitian ini melalui sudut pandang ekologi politik yang memetakan masalah berdasarkan kaca mata peneliti.

Ketiga, penelitian “Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah: Mekanisme Politik Di Balik Kerusakan Ekologi” memiliki persamaan mengenai dampak negatif ekspansi sawit di Kalteng akibat patronase serta isu-isu politik lokal. Perbedaan antara dengan penelitian ini yaitu pengkajian sosial ekologi yang terfokus pada fenomena perubahan lingkungan dan bagaimana tindakan aktor (pelaku, penegak hukum, masyarakat) dalam melihat permasalahan yang terjadi di wilayah ini.

Keempat, persamaan penelitian konsep Kapitalisme Dan Marjinalisasi Masyarakat Lokal Dalam Arena Kuasa Dan Pengetahuan” bahwa ¹Masyarakat dan keberlangsungan sumber daya alam, konsep Ekspansi Kelapa sawit : Power dan Marjinalisasi masyarakat Lokal, konsep Aktor ruang, kuasa, pengetahuan. Namun penelitian ini berbeda, yang berfokus pada bagaimana menyelaraskan kapitalisme dengan kaum proletariat melalui akses ekologi politik.

Kelima, persamaan penelitian terdahulu dengan judul penelitian “Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perubahan Sosial Ekologi Pedesaan” yang membahas persoalan ¹Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan perubahan lanskap. ²Perubahan lanskap ekologi juga telah menyebabkan perubahan sistem penghidupan masyarakat sekitar taman nasional. Sedangkan tolak ukur penelitian ini hanya berskala daerah.

Keenam, jenis penelitian “Pertanggung jawaban Korporasi Di Sektor Lingkungan” yang bermakna Meminta pertanggung jawaban korporasi, terkait dugaan yang tindak pidana yang dilakukan korporasi merupakan perkara rumit. Sedangkan penelitian ini lebih mempertimbangkan pertanggung jawaban instansi pemerintah selaku aktor pembuat dan

pengimplentasian kebijakan lingkungan yang belum berjaan dan pengawasan yang masih minim.

Ketujuh, jenis penelitian “Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang” yang berisi Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam kerangka regulasi. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki titik sentral pada penelitian ini mengarah pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (JDIH BPK RI).

Kedelapan, keselarasan pada penelitian ini yaitu “Pengaruh Investasi Asing Pt. Agromuko Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Provinsi Bengkulu”. Bahwa forst crimen (kejahatan hutan) oleh PT. Agromuko di kawasan hutan wilayah Bengkulu dibawah naungan pemerintah, serta adanya tindakan penyelewangan data teradap dokumne RSPO, terkait izin HGU PT. Agromuko. Namun dalam penelitian ini tidak mengakaji masalah dampak ekonomi yang diteliti sebelumnya. Kerusakan lingkungan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat seperti berkurangnya lahan hutan, pencemaran sungai, rusaknya habitan flora dan fauna akibat keditidakseimbangan ekosistem hutan yang sudah menjada area perkebunan kelapa sawit yang bersangkutan dengan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Provinsi Bengkulu

Kesembilan, penelitian yang bertajuk “Kerentanan Sistem Perizinan Perkebunan Sawit” membahas tentang Persoalan tata kelola perizinan masih rawan dengan praktik korupsi. Izin-izin yang sudah diterbitkan belum dilakukan pengawasan yang baik dan masih tinggi risiko kerugian keuangan negara dalam tata kelola perkebunan sawit dan pelanggaran hukum lingkungan yang tak terbendung. Namun penlitian ini akan membahas bagaimana menyearaskan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan etika politik yang ada daam ekologi politik.

Penelitian terakhir, adalah “Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Hidup Studi Kasus kab. Pelalawa, Riau” yang berartikan Dampak sosial akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan terjadi konflik dan pergeseran norma adat,

nilai kehidupan dan norma dalam penyelesaian konflik. Sedangkan penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana konsep kutukan sumber daya alam juga memiliki pengaruh didalam kasus-kasus peneleitian terdahulu dan saat ini.

F. KERANGKA TEORI

1.1.Pengertian Dampak

Dampak menurut Waralah adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Sedangkan menurut Hikmah Arif “Pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘Sesuatu’. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya “sesuatu” (Waralah, 2008).

Melalui penjabaran diatas, dampak dibagi menjadi dalam dua jenis yaitu :

1) Dampak Positif

Dampak adalah mempengaruhi sesuatu dengan adanya keberadaan suatu objek,subjek,aktor dan sedangkan redaksi “*positif*” artinya pemikiran,perilaku, yang memperhatikan hal hal yang baik yang memberikan rasa keyakinan, mempengaruhi, memberi kesan baik terhadap sesuatu yang di pengaruhi.

2) Dampak Negatif

Secara umum adalah mempengaruhi suatu objek,subjek,pihak,aktor dalam hal yang kurang baik atau menimbulkan kerugian terhadap sesuatu yang dipengaruhi.

1.2. Dampak sosial Ekologi

Konsep dampak sosial ekologi merupakan hubungan manusia sebagai makhluk sosial bagian dari sistem ekologi (lingkungan). Bahwa manusia sebagai aktor merupakan

bagian integral dari ekosistem global dan memiliki hubungan timbal balik dengan komponen dengan komponen biotik (organisme hidup) dan abiotik (lingkungan fisik).

Berikut merupakan poin penting dalam menjelaskan konsep dampak ekologi sosial yang dikutip dari buku "*Mengenal Dampak Sosial Ekologi*" yaitu sebagai berikut :

1. **Ketergantungan terhadap sumber daya alam**

Manusia sangat bergantung pada sumber daya alam (SDA) seperti air bersih, tanah, udara, dan berbagai spesies organisme untuk kehidupan dan keberlangsungan hidup, yaitu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam.

2. **Dampak manusia terhadap lingkungan** ; aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam menyebabkan deforestasi, polusi, yang berkepanjangan menyebabkan pencemaran lingkungan terburukan dan non-terburukan, perubahan iklim akibat kebutuhan konstruksi dan industri.

3. **Interaksi manusia dengan organisme lain**

Bahwa banyak pola manusia dalam melakukan interaksi dengan organisme lain (flora dan fauna, hayati, non-hayati). Interaksi ini terjadi karena adanya pola konsumen, produsen, dan pengurai.

4. **Peran Manusia dalam Mempertahankan keseimbangan Ekologi** ; manusia memiliki peran penting dalam mempertahankan keseimbangan ekologi yang memiliki ekosistem yang memiliki kelas masing masing didalam ekosistem hidup, melalui konservasi, restorasi habitat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta pelestarian keanekaragaman hayati, karena manusia dapat membantu menjaga kestabilan ekosistem.

5. **Pengaruh budaya dan Nilai Manusia** ; faktor budaya dan nilai-nilai manusia mempengaruhi cara manusia sebagai makhluk sosial dalam berhubungan langsung dengan lingkungan baik secara individu, kelompok, dimana keyakinan/prinsip, praktik agama, Pemerintahan, dan sistem nilai budaya memainkan peran dalam pengelolaan lingkungan dan pemahaman terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan hidup yang sejahtera dan seimbang. (Khairunnisa, 2019).

1.3. Teori Ekologi Politik

Bahwa menurut Paul Robbins (Helwig et al., n.d.) dalam buku "A Critical Introduction Political Ecology" menegaskan ekologi politik yaitu:

a) **Deforestasi dan Degradasi**

Deforestasi adalah perubahan lingkungan secara permanen dari areal berhutan menjadi non-hutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Terkait dalam kajian ini deforestasi hutan di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1982 ketika

PT. Agromuko sudah melakukan ekspansi yang sebelumnya lahan hutan di alihgunakan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, degradasi merupakan dampak dari pengalihan lahan hutan (deforestasi) menjadi area PT. Agromuko yang menyebabkan tergedradasinya lahan hutan menjadi berkurang, turunnya kualitas ruang lingkup lingkungan hidup di Mukomuko tercemarnya air bersih di sungai-sungai Mukomuko, penurunan kualitas udara akibat polusi dan limbah pabrik PT. Agromuko yang bau, berkurangnya habitat satwa liar dan satwa lindung di Mukomuko, dan hilangnya sumber pangan dari hutan yang biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan (seperti rotan dan umbut rotan, dll) dan juga sumber mata pencaharian (berkurangnya tempat wilayah memasang lukah; perangkap ikan lele tawar) karena hutan bakau juga berkurang akibat ekspansi PT. Agromuko.

b) Konflik Sumber daya Alam

Yaitu merupakan ketidakselarasan, kurangnya kesepakatan antar pihak satu dengan yang lain, dan perselisihan mengenai akses, kendali, dan pemanfaatan sumber daya alam. Tentunya hal ini terjadi ulah tangan manusia itu sendiri, sebagai aktor dalam mengelola sumber daya alam berupa Tanah (lahan). Karena kinerja pemerintah yang belum optimal dan pihak swasta sebagai elit sosial (korporasi) yang masih ceroboh dalam mengelola yang merembet ke lingkungan, kelas, etnik budaya yang menyebabkan timbulnya konflik sumber daya karena daya dukung lingkungan yang terbatas seperti sumber utama konflik yaitu keterbatasan tata kelola suatu organisasi, kegagalan komunikasi, perbedaan sifat (budaya, norma-nilai etika lingkungan, serta persepsi) yang memicu berbagai jenis konflik berdasarkan konflik individu, konflik antar kelas sosial, konflik rasial, isu politik lingkungan.

c) Konservasi dan kontrol

Konservasi seyogyanya mengacu pada pelestarian dan melindungi lingkungan baik hutan, sungai cagar alam, dan sebagainya. Tata kelola lingkungan yang baik adalah kunci dari konservasi dan kontrol terutama berdasarkan peran Pemerintah, masyarakat, pihak korporasi itu sendiri dalam memanfaatkan sumber daya alam

berupa lahan di Kabupaten Mukomuko yang di jadikan sebagai area lahan PT. Agromuko dalam berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.

Pemerintah memegang kendali atau kontrol penuh atas keberadaan PT. Agromuko dalam menjalankan bisnis agraris dimukomuko. Dimana pemerintah Mukomuko selalu mengontrol batas HGU atau lahan yang dijadikan area perkebunan sawit PT. Agromuko agar tidak merambah ke hutan produksi, wilayah warga, sepadan laut Mukomuko, serta konservasi dan kontrol dari pihak PT. Agromuko selalu melaporkan hasil laporan pelaksanaan perencanaan pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) ke instansi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko di setiap 3 bulan sekali yang menjadi bukti konservasi dan kontrol antara pemerintah dan pihak Agromuko berjalan dengan masif dan berkelanjutan.

Dan disamping itu peran masyarakat juga sangat dibutuhkan sebagai aktor yang berpartisipasi dalam hal konservasi dan kontrol lingkungan baik konservasi hayati dan non hayati sebagai pihak pelopor (informing), plakasi (pengambilan keputusan), sebagai mitra kebun masyarakat desa (KMD) , sebagai sumber informasi dan mobilisasi lingkungan seperti adanya Lembaga swadaya masyarakat dalam memantau aktivitas PT. Agromuko agar tidak melanggar dan melakukan pencemaran lingkungan terkait ekspolarasi perkebunan sawit PT. Agromuko diwilayah Mukomuko.

2. Identitas Lingkungan dan Gerakan Sosial (Robert Miesel)

Konsep gerakan sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat. Menurut Gerakan sosial menurut Robert Miesel, didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang terlembagakan yang

dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat (Sadikin, 2005).

Menurut Abrele (GmbH, 2016) Gerakan sosial transformatif memiliki tujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh, atau menggiring gerakan sosial ke ranah yang lebih luas dan bertujuan untuk menjalankan suatu kepentingan dengan suatu perubahan sosial yang diharapkan. dengan dimensi yang kompleks seperti isu lingkungan, HAM, gender dan sebagainya yang menjadi tahap awal gerakan sosial baru. Perjuangan sosial politik terkait dengan upaya mempertahankan dan melindungi lingkungan serta SDA.

G. Defenisi Konseptual

Definisi konseptual menjadi unsur penelitian yang penting dan menjadi acuan oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena Sosial dan alamiah (Singaribun & Masri, 1989). Definisi konseptual adalah sebagai suatu bentuk untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam proses penelitian.

1.1. Dampak

Pengertian dampak secara umum adalah pengaruh yang menghasilkan dua sisi yaitu positif dan negatif. Pengaruh adalah suatu daya dan muncul dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian ada sebuah gaya, kedudukan, aksi, dan sebagainya yang berarti adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara “ *mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi*” sehingga adanya subjek, objek, aktor, fenomena, dan sebagainya. Menurut para ahli dampak bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh suatu pihak sehingga ketika ada aksi akan menghasilkan reaksi dan juga sebaliknya.

1.2. Dampak Sosial Ekologi

Pengertian ekologi Resosoedroma adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pendekatan ekologi mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam setiap jaringan kehidupan, makhluk hidup bersaing untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Manusia, sebagai bagian dari alam, merupakan bagian terpenting dari sistem lingkungan yang kompleks. Namun pengertian ekologi sosial adalah suatu pandangan yang berupaya memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya. Manusia mempengaruhi dan selalu mempengaruhi lingkungan dalam kehidupannya. Perubahan pada salah satu komponen tersebut menyebabkan perubahan pada komponen lainnya secara keseluruhan. Keteraturan hubungan antara sistem sosial dan ekosistem dapat terwujud dalam bentuk aliran energi internal, material dan informasi, atau sebagai pengaruh dari luar.

Berkes dan Folke (Crystallography, 2016) menyatakan bahwa :

“Sistem sosial-ekologi adalah sistem yang dibentuk dari komponen biologi, geologi, dan fisik serta beragam aktor dan institusi sosial terkait dengan komponen-komponen tersebut. Sistem sosial-ekologi sifatnya kompleks dan adaptif serta dibatasi oleh lingkup ruang atau fungsi yang terhubung dengan ekosistem dan konteks masalah tertentu. Sistem social ekologi merupakan bentukan dari sistem manusia dan sistem alam yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi”. Teori pendekatan ekologi ditekankan pada keterkaitan antara fenomena sosial dengan variabel lingkungan yang ada.

Manusia sebagai lembaga lingkungan hidup di muka bumi mempunyai peranan penting dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang cerdas mampu mengubah wajah dunia dari pola hidup sederhana menjadi bentuk kehidupan modern. Namun sayangnya, tindakan masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan pemikiran mengenai masa depan generasi penerus. Banyak kemajuan yang dilakukan manusia telah memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Beberapa kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia adalah : Pencemaran yang disebabkan oleh kawasan industri (pencemaran udara, air, tanah dan suara). Tanah longsor adalah akibat langsung dari penggundulan hutan. Banyak aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang turut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, dan pada akhirnya manusia sendirilah yang menderita kerugian tersebut.

1.3. Ekologi Politik

Dalam implementasi analisis data terkait permasalahan di lokasi penelitian maka penulis menjabarkan permasalahan tersebut melalui pendekatan teori Robbins (2004) :

i) Deforestasi dan Degradasi

Isu perubahan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi yang berlebihan yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan hutan yang memberikan dampak terhadap Perubahan Lingkungan disekitar wilayah ini, tingkat PH tanah, polusi udara, air sungai dan lainnya.

ii) Konflik lingkungan

Yaitu adanya kelangkaan, permasalahan sumberdaya akibat pemanfaatan SDA oleh negara, swasta/elit sosial (korporasi) yang merembet ke lingkungan, kelas, etnik budaya. Bahwa sumber utama perselisihan yang mengarah pada problematika lingkungan yaitu persaingan sumber daya, Perbedaan penilaian relatif dari sumber daya dan pengetahuan dan pengetahuan yang tidak memandang biaya, manfaat dan resiko. Secara sederhana konflik lingkungan dapat di artikan sebagai suatu sistematis untuk memperoleh hal-hal yang langka (jarang terjadi), contohnya nilai dan otoritas. Sementara tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan suatu pihak yang dirasa berlawanan dengan sesuatu hal berupa, budaya, lingkungan, sosial dan aturan aturan yang berlaku di sebuah wilayah.

iii) Konservasi dan kontrol

Konflik yang bersumber dari masalah konservasi yang disebabkan oleh terbutnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam serta diabaikannya mata pencaharian dan organisasi komersil ekonomi mereka hanya karena demi konservasi.

2. Identitas Lingkungan dan Gerakan sosial

Identitas lingkungan dapat serupa dengan identitas kolektif lainnya (seperti identitas nasional atau etnis) dalam memberikan kita rasa keterhubungan, menjadi bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan mengakui kesamaan antara diri kita dan orang lain. Seperti identitas kelompok, identitas lingkungan dapat bervariasi baik dalam definisi maupun kepentingannya antar individu. Sedangkan Gerakan sosial merupakan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang dilakukan oleh rakyat biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh. Bahwa menurut Abrele (Gmbh, 2016) Gerakan sosial transformatif memiliki tujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh, atau menggiring gerakan sosial ke ranah yang lebih luas dan bertujuan untuk menjalankan suatu kepentingan dengan suatu perubahan sosial yang diharapkan dengan dimensi yang kompleks seperti isu lingkungan, HAM, gender dan sebagainya yang menjadi tahap awal gerakan sosial baru.

H. Defenisi Operasional

Definisi operasional memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dalam arti sebagai acuan ataupun pedoman dalam pelaksanaan sebagaimana mestinya variabel dapat diukur. Untuk memudahkan menganalisa data maka penulis memberikan batasan-batasan dan alat ukur dengan maksud untuk menjawab masalah penelitian.

1.3. Tabel Defenisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Deforestasi & Degradasi	Eksploitasi sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan Fungsi Lahan/Berkurangnya lahan hutan.
Konflik Lingkungan	Konflik Sumber Daya alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Depolitisasi ekologi Politik. b. Pelanggaran hak ketenaga kerjaan buruh.
Konservasi dan Kontrol	Penguasaan dan Pengelolaan Sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanggung jawaban Korporasi. b. Struktural Ruang Lingkup Ekologi c. Kondisi Umum/Pengelolaan

		dampak sosial (Internal Sosial Impact)
Identitas Lingkungan	Gerakan sosial transformatif	a. Upaya gerakan Lemabaga Swadaya (LSM) dan Persatuan Masyarakat Penggugat HGU.

I. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam kajian materi penelitian ini, analisa peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif menurut ahli yaitu

Miles and Huberman (Kusumawati, 2018) Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan”..

Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Oleh sebab itu penelitian kualitatif secara umum sering disebut sebagai pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat atau dikumpulkan.

2) Lokasi penelitian

Peneleitian ini akan dilaksanakan di beberapa wilayah di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu :

Tabel 1.4. Lokasi Penelitian

No	Nama Wilayah
----	--------------

1	Kec. Kota Mukomuko
2	Kec. Air Dikit
3	Kec.Teras Terasterunjam

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode untuk proses collection (pengumpulan data). Dalam hal ini akumulasi data untuk mencari informasi berdasarkan fakta dan opini yang kemudian diolah agar peneliti mampu mencapai sasaran penelitian ketika melakukan pengujian data, dimana data diperoleh berdasarkan data sekunder dan primer.

Berikut merupakan metode data collection data dalam menyusun penelitian ini yang berdasarkan :

3.1) Data Primer

Sumber primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada pihak pengumpul data atau peneliti (Tobing et al., 2016). Sumber data tersebut didapatkan melalui informan secara langsung melalui wawancara dilokasi penelitian.

Data Sekunder

Sumber ini didapatkan melalui cara membaca dan juga mempelajari untuk kemudian dipahami melalui media-media penunjang lainnya seperti dari literature penelitian-penelitian, buku serta dokumen lainnya (Dr.farida Nugrahani, 2014)

Tabel 1.5. Informan Data

No	Informan	Jumlah	Waktu
1	Bupati Mukomuko : Sapuan	1	Senin, 19 Juni 2023
2	Ketua DPRD Mukomuko : Ali Saftaini	1	Senin, 29 Mei 2023
3	a. Manager Estate TRE : Aanrianto b. Manager Estate MME : Zulkawi c. Manager Estate SJE : Syahrul	3	Selasa, 23 Mei 2023 Senin, 22 Mei 2023 Selasa, 23 Mei 2023
4	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) : Budiyanto	1	Senin, 15 Mei 2023
5	Dinas Pertanian Kab. Mukomuko : Aguswono	1	Senin, 19 Juni 2023
6	Kesatuan Pengelola Hutan Produksi : Aprin Sihaloho	1	Selasa, 09 Mei 2023
7	Badan Pusat Statistik (BPS) : Komarudin	1	Senin, 08 Mei 2023
8	Wakil Camat Kec. Kota Mukomuko : Hafni Diana	1	Kamis, 11 Mei 2023
9	Camat Kecamatan Air Dikit : Iskameri	1	Rabu, 17 Mei 2023
10	Camat Kec.Terasterunjam Terasterunjam : Yeni Wulandari	1	Selasa, 16 Mei 2023
11	Persatuan Masyarakat Penggugat HGU : Zahwani/Cap	1	Rabu, 17 Mei 2023
12	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) : Weri Tri Kusumaria	1	Senin, 19 Juni 2023

3.2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

3.3) Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.